

PERSAMAAN HAK PENGANUT AGAMA DAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA

TESIS

Diajukan Kepada

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum

untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum



Disusun Oleh:

Ceprudin

NPM: 322014002

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2015**

**PERSAMAAN HAK PENGANUT AGAMA DAN
KEPERCAYAAN DI INDONESIA**

Tesis

Oleh:

Ceprudin

322014002

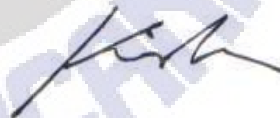
Telah Disetujui untuk Diuji
Tanggal 3 Desember 2015

Pembimbing I



Dr. Titon Slamet Kurnia, SH., MH

Pembimbing II



Dr. Krishna Djaya Darumurti, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Persamaan Hak Penganut Agama dan Kepercayaan di Indonesia**

Nama : **Ceprudin**

NPM : **322014002**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Menyetujui



Dr. Titon Slamet Kurnia, SH, MH

Pembimbing I



Dr. Krishna Djawa Darumurti, SH, MH

Pembimbing II

Mengesahkan

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Umhu Rauta, SH, M.Hum

Dinyatakan Lulus Ujian Tanggal 3 Desember 2015



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Jalan Diponegoro 52-60 SALATIGA 50711
Telp. (0298) 321212, Fax. (0298) 321433
Alamat e-mail : library@uksw.ac.id
Alamat situs : <http://www.uksw.ac.id>

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ceprudin

NIM : 322014002

Email : ceprudin.cecep@gmail.com

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tugas Akhir : Persamaan Hak Pengikut Agama dan Kepercayaan di Indonesia

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai).

☒ Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA

Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

* Hak yang tidak terbatas hanya bagi pengguna saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat menggunakan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.

** Hanya akan menepalkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus disertai dengan penjelasan alasan tertulis dari penditugas TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas sebelum upload.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 16 Desember 2015

1956

Ceprudin
Mahasiswa

Mengetahui,

Dr. Titon Slamet Kurnia, SH., MH
Pembimbing I

Dr. Krishna Djaya Darumurti, SH., MH
Pembimbing II



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Ceprudin	
NIM	322014002	Email : ceprudin.cecep@gmail.com
Fakultas	Fakultas Hukum	Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tugas Akhir	Persamaan Hak Penganut Agama dan Kepercayaan di Indonesia	
Pembimbing	1. Dr. Titon Slamet Kurnia, S.H., MH	
Pembimbing	2. Dr. Krishna Djaya Darumurti, SH., MH	

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
- Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
- Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
- Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama-pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salation: 16 December 2015



Ceprudin

Daftar Peraturan Perundang-undangan

UUD NRI 1945

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No. 24 Tahun 2013 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2013 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden (Perpres) No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan No. 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial untuk Komunitas Budaya

Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan (Bakor Pakem)

Daftar Putusan Pengadilan

Putusan MA No. 1115 K/Pid/2012

Putusan MK No. 84/PUU-X/2012

Putusan No. 140/PUU-VII/2009

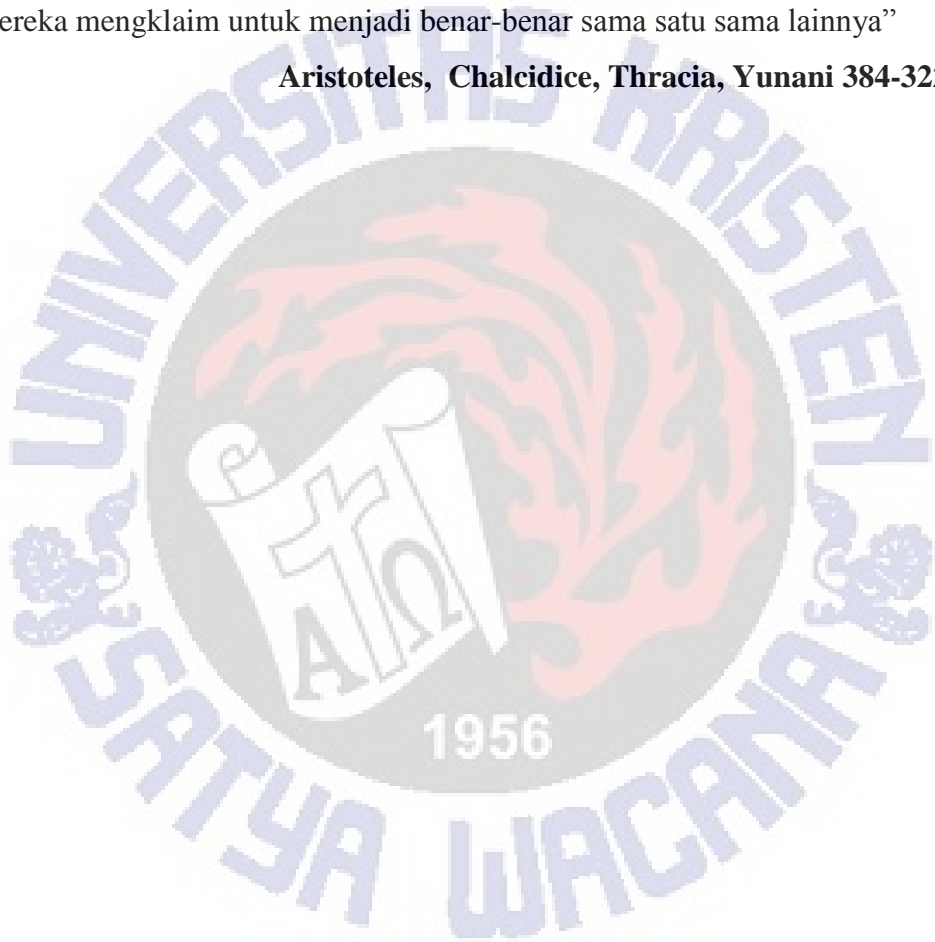
Putusan PN Klaten No. 3/Pid.B/2012/PN.Klt

Putusan PN Semarang No. 98/PID/2012/PT.SMG

Moto

”Demokrasi muncul dari pemikiran bahwa mereka sama (sederajat) dalam hal apapun, adalah sama dalam segala hal, karena mereka sama-sama bebas, mereka mengklaim untuk menjadi benar-benar sama satu sama lainnya”

Aristoteles, Chalcidice, Thracia, Yunani 384-322 SM



KATA PENGANTAR

Puji Sykur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: "Persamaan Hak Penganut Agama dan Kepercayaan di Indonesia". Isu sentral yang dikaji dalam tesis ini adalah persamaan hak antara penganut agama dan penganut kepercayaan di Indonesia. Studi ini berangkat dari tesis bahwa "penganut kepercayaan memiliki hak yang sama dengan penganut agama". Karena itu peraturan perundang-undangan di Indonesia harus melindungi hak-hak dasar penganut kepercayaan.

Penulis amat sadar dalam penyusunan tesis ini banyak keterbatasan, namun berkat bimbingan dan motivasi dari banyak pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk arahan, bimbingan dan motifasinya penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bpk. Dr. Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H (Pembimbing I) yang telah memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penulisan tesis ini.
2. Bpk. Dr. Krishna Djaya Darumurti, S.H, M.H, (Pembimbing II) yang telah memberikan pencerahan khususnya selama melakukan penulisan tesis ini dan umumnya mengenai ilmu hukum.
3. Bpk. R.E.S. Fobia, SH, MIDS dan Bpk. Arie Siswanto, S.H., M.Hum sebagai penguji yang telah memberikan masukan-masukan untuk perbaikan penelitian ini.
4. Bpk. Rektor Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Prof. John A Titaley, Dekan Fakultas Hukum Prof. Teguh Prasetyo, S.H, M.Si, Kaprodi Magister Ilmu Hukum (MIH) Dr. Umbu Rauta, S.H, M.Hum, Mantan Kaprodi MIH Dr Tri Budiyo, S.H, M.Hum, dan seluruh dosen MIH serta semua civitas akademik Fakultas Hukum (FH) UKSW.

5. Terkhusus untuk kedua orang tua dan keluarga di kampung halaman yang telah memberikan kekuatan dalam menempuh kuliah magister, penulis ucapkan terima kasih tiada terhingga.
6. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Putri Dwi Kirana, yang telah memberikan spirit berjuang keras untuk terus belajar. Kau adalah wanita hebat.
7. Terima kasih juga untuk Dr. Tedi Kholiludin, S.H.I, M.Si, yang tak bosan membimbing dan memberi uang saku saat motor tua saya mengalami kekosongan bahan bakar saat hendak berangkat kuliah.
8. Kepada teman-teman seperjuangan untuk menegakkan keadilan di Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang, ada Iman Fadhilah, Siti Rofiah, Yayan M Royani, Ubbadul Adzkiya', Munif Ibnu, Abdus Salam, Nazar Nurdin, M. Zainal Mawahib, Khoirul Anwar, Anis Fitria dan Cahyono.
9. Kpd. Ketua Tanfidziyah dan Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah, KH Abu Hapsin, M.A, Ph.D dan KH Ubbaidullah Shadaqoh penulis ucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya untuk mengajarkan arti ikhlas berkorban dalam perjuangan.

Atas mereka semualah semua proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini terselesaikan. Penulis menyadari banyak kekurangan dalam tesis ini, untuk itu, penulis berharap ada saran, kritik, dan koreksi, untuk perbaikan tesis ini.

Salatiga, 22 November 2015



Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Pernyataan Persetujuan Akses.....	iv
Lembar Pernyataan.....	v
Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Putusan.....	vi
Moto.....	vii
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Singkatan.....	xiv
Abstrak.....	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
1. Perlindungan Terhadap Martabat Manusia.....	7
2. Relasi Agama dan Negara.....	9
3. Perlindungan dari Intervensi Negara terhadap Kebebasan Menganut Kepercayaan.....	12
3.1. Toleransi Beragama.....	12
3.2. Prinsip Non-Intervensi dan Diskriminasi Negara terhadap Penganut Kepercayaan.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II: KONSEP AGAMA DAN KEPERCAYAAN, PENGANUT AGAMA DAN PENGANUT KEPERCAYAAN DI INDONESIA

A. Hakikat Kesamaan Konseptual.....	20
1. Konsepsi Agama dan Penganut Agama.....	27
2. Konsep Kepercayaan dan Penganut Kepercayaan.....	30
B. Intervensi Negara Menjadi Jurang Pembeda Agama dan Kepercayaan.....	35
1. Kekeliruan Negara Membuat Kriterai/Definisi Agama dan Kepercayaan.....	36
2. Kekeliruan Negara Menempatkan Kepercayaan pada Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.....	39

BAB III: KONSEP HUKUM PERSAMAAN HAK PENGANUT AGAMA DAN PENGANUT KEPERCAYAAN DI INDONESIA

A. Prinsip Universalitas Hak Asasi Manusia.....	42
1. Hak Asasi Individual.....	46
2. Hak Asasi Sosial.....	47
3. Tiga Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia.....	48
B. Prinsip Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan.....	51
1. Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dalam DUHAM, UU No. 12 Tahun 2005, UUD NRI 1945, dan UU No. 39 Tahun 1999.....	52
2. Konsep Kunci Kebebasan Beragama/Berkeyakinan.....	56
C. Prinsip Kesamaan Hak Penganut Agama dan Penganut Kepercayaan di Indoneisa.....	64
1. Prinsip Non-Diskriminasi dan Intervensi Terhadap Penganut Kepercayaan.....	64
2. Prinsip Toleransi sebagai Kewajiban 'To Protect' Negara.....	67

BAB IV: PENGATURAN AGAMA DAN PENGANUT AGAMA, KEPERCAYAAN DAN PENGANUT KEPERCAYAAN DI INDONESIA

A. Intervensi Negara terhadap Kebebasan Menganut Kepercayaan Melalui Peraturan Perundang-undangan..... 69

1. Pengaturan tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama..... 70
2. Pengaturan tentang Administrasi Kependudukan..... 72
3. Pengaturan tentang Pendirian Rumah Ibadah, Pemakaman dan Hak Pendidikan Penganut Kepercayaan..... 76
4. Pengaturan tentang Menempatkan Kepercayaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan..... 79
5. Pengaturan tentang Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penganut Kepercayaan..... 81

B. Pengaturan tentang Kepercayaan Bertentangan dengan Hakikat Konsep Kesamaan Agama dan Kepercayaan serta Konsep Kesamaan Hak Penganut Agama dan Penganut Kepercayaan..... 84

1. Inkoherensi Pengaturan tentang UU Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dengan Hakikat Konsep Kesamaan Agama dan Kepercayaan, serta Konsep Kesamaan Hak Penganut Agama dan Penganut Kepercayaan..... 84
2. Inkoherensi Pengaturan Administrasi Kependudukan dengan Hakikat Konsep Kesamaan Agama dan Kepercayaan serta Konsep Kesamaan Hak Penganut Agama dan Penganut Kepercayaan..... 91
3. Inkoherensi Pengaturan Pendirian Tempat Ibadah, Pemakaman dan Pendidikan Agama/Kepercayaan dengan Hakikat Konsep Kesamaan Agama dan Kepercayaan serta Konsep Kesamaan Hak Penganut Agama dan Penganut Kepercayaan..... 100
4. Inkoherensi Pengaturan tentang Penempatan Kepercayaan pada Kemendibud dengan Hakikat Konsep Kesamaan Agama dan Kepercayaan

serta Konsep Hukum Kesamaan Hak Penganut Agama dan Penganut Kepercayaan	106
5. Inkohistensi Pengaturan tentang Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penganut Kepercayaan dengan Hakikat Konsep Kesamaan Agama dan Kepercayaan serta Konsep Kesamaan Hak Penganut Agama dan Penganut Kepercayaan.....	109
C. Preskripsi Pengaturan tentang Kepercayaan yang Sesuai dengan Prinsip Kesamaan Hak antara Penganut Agama dan Kepercayaan di Indonesia.....	112
1. Kesalahan Praktik Pemerintah dalam Hubungan Agama-Kepercayaan.....	113
2. Pengaturan tentang Kepercayaan yang Sesuai dengan Prinsip Kesamaan Hak antara Penganut Agama dan Kepercayaan.....	116
BAB V: PENUTUP.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	132

DAFTAR SINGKATAN

Adminduk	: Administrasi Kependudukan
AKI	: Amanat Keagungan Ilahi
Bakor Pakem	: Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan
BKKI	: Badan Kongres Kebatinan seluruh Indonesia
Dispendukcapil	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Ekosob	: Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICCPR	: Internasional Covenant on Civil and Political Rights
ICESCR	: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
Keppres	: Keputusan Presiden
KK	: Kartu Keluarga
KTP	: Kartu Tanda Pendudukan
Menag	: Menteri Agama
Depag	: Departemen Agama
Menbudpar	: Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
MK	: Mahkamah Konstitusi
No	: Nomor
NRI	: Negara Republik Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

PN	: Pengadilan Negeri
Perber	: Peraturan Bersama
Permendikbud	: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
PP	: Peraturan Pemerintah
Sipol	: Sipil dan Politik
SKT	: Surat Keterangan Terdaftar
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
UDHR	: Universal Declaration of Human Right
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
WNI	: Warga Negara Indonesia

ABSTRAK

Persamaan Hak Penganut Agama dan Kepercayaan di Indonesia sangat penting untuk diwujudkan. Penganut kepercayaan di Indonesia memiliki hak yang sama dengan penganut agama (penganut ‘agama resmi negara’). Oleh karenanya peraturan perundang-undangan harus melindungi hak-hak dasar penganut kepercayaan.

Jaminan kebebasan menganut agama atau menganut kepercayaan di Indonesia dijamin dalam Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) 1945. Pasal 29 Ayat (2) menyatakan ”negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Sayangnya, peraturan perundang-undangan yang merinci gagasan mulia UUD NRI 1945 belum mampu memenuhi hak-hak dasar kelompok minoritas (*minority right*) kepercayaan. Pengaturan yang ada justru menjadi ‘sponsor’ terjadinya diskriminasi pembuatan sanggar, pendidikan agama, pelayanan Adminduk seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran, dan pengawasan yang berlebihan.

Supaya hak dasar penganut kepercayaan terpenuhi, maka negara perlu memperbaiki bahkan membatalkan beberapa peraturan perundang-undangan yang secara substansial bertentangan dengan prinsip non-intervensi negara terhadap agama yang tertuang dalam UUD 1945.

ABSTRACT

Equality of rights adherent religions and beliefs in Indonesia are very important to be realized. Adherent of beliefs in Indonesia have equality of rights with adherent of religions ('state of religions'). Therefore, legislations must be protected basic rights adherent of beliefs.

Protection of freedom embrace religions or beliefs in Indonesia are be guaranteed in Constitution of Republic Indonesia (UUD NRI) 1945. Article 29 Paragraph (2) said, "the state guarantees the independence each citizens to embrace religions each another and to worship according to their religions and that beliefs".

It is unfortunately, legislations which be detailing noble idea UUD NRI 1945 has not been to ful fil the fundamental rights of minorities. The legislations which exists become the sponsor discriminations. Some cases of discrimination, among others; building houses of worship, religious education, services administration occupations, such as creat of identity card occupations (KTP), identity family cards, marriage certificate, birth certificate, and than over watching.

So that basic rights the adherent beliefs to ful fil, state must be improved even had to cancel some legislations which substantially to contradict which prinsip non-intervensi state to religion. It is erased and repaired are some legislations as regards religions and beliefs, is be expected basic rights adherent of beliefs to fulfilled.

Key Word: Religions and Beliefs, Legislations, Protected, To Ful Fill, Basic Rights